



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI TABACINA AKHMAD**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **197426**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.627.000.000
1. Bangunan Seluas 0 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, Rp. 25.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 24 m2/40 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA LUWU UTARA, Rp. 920.000.000		
5. Tanah dan Bangunan Seluas 8 m2/14 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000		
6. Tanah dan Bangunan Seluas 16 m2/18 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	19.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	756.800
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.647.256.800
III. HUTANG	Rp.	757.382.994
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	889.873.806



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.